

## DAFTAR ISI

	Halaman
Sekapur Sirih	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Dasar Hukum	2
B. Gambaran Umum	4
1. Geografis Wilayah	4
2. Gambaran Demografis	6
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	10
4. Perkembangan Ekonomi	16
5. Potensi Unggulan Daerah	17
6. Pertumbuhan Ekonomi	19
<b>BAB II      KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>26</b>
1. Visi dan Misi	26
2. Arah Kebijakan Pembangunan	40
3. Prioritas Daerah (RKPD) Tahun 2015	46
<b>BAB III      KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>56</b>
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	57
a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	57
b. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	58
c. Permasalahan dan Solusi	63
2. Pengelolaan Belanja Daerah	63
a. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	63
b. Target dan Realisasi Belanja	80
c. Permasalahan dan Solusi	81
3. Pengelolaan Pembiayaan	82
a. Kebijakan Umum Pembiayaan	82
b. Target dan Realisasi Pembiayaan	84
c. Permasalahan dan Solusi	85
<b>BAB IV      PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>86</b>
1. Urusan Wajib	86
1. Pendidikan	86
2. Kesehatan	130
3. Lingkungan Hidup	258
4. Pekerjaan Umum	288
5. Penataan Ruang	302
6. Perencanaan Pembangunan	304
7. Perumahan dan Permukiman	316
8. Kepemudaan dan Olahraga	324
9. Penanaman Modal	327

10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	336
11. Kependudukan dan Catatan Sipil	345
12. Ketenagakerjaan	352
13. Ketahanan Pangan	368
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	378
15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	381
16. Perhubungan	385
17. Komunikasi dan Informatika	391
18. Pertanahan	393
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	396
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.	410
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	527
22. Sosial	531
23. Kebudayaan	546
24. Statistik	548
25. Kearsipan	550
26. Perpustakaan	552
2. Urusan Pilihan	558
1. Pariwisata	558
2. Kelautan dan Perikanan	563
3. Pertanian	570
4. Kehutanan	597
5. Energi dan Sumber Daya Mineral	603
6. Industri	616
7. Perdagangan	619
<b>BAB V      PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN</b>	624
1. Tugas Pembantuan yang Diterima	624
a. Dasar Hukum	624
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	625
c. Instansi Penerima Tugas	626
<b>BAB VI      PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN</b>	638
1. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	638
2. Koordinasi dengan Instansi Vertikal Daerah	639
3. Pembinaan Batas Wilayah	641
4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	643
5. Pengelolaan Kawasan Khusus	649
6. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	662
<b>BAB VII     PENUTUP</b>	671